

## MENGUJI FAKTOR DETERMINAN *FINANCIAL SUSTAINABILITY* PADA SEKTOR PEMERINTAH

Dinar Tri Wardhani<sup>1</sup>, Payamta<sup>2</sup>  
Magister Akuntansi, Universitas Sebelas Maret  
[dinarwardhani95@gmail.com](mailto:dinarwardhani95@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to examine the factors that influence financial sustainability in government sector. The factors are chosen in terms of demographics, economics, social, and finance in the local government. The results of this study are important to be advice for district or city governments in Indonesia to make appropriate policies so that they can encourage financial sustainability without burdening the community. Financial sustainability is measured using elements in adjusted Operational Reports. The population of this study is the district / city government in Java on 2015-2018 fiscal year. The research sample was taken using the purposive sampling method, obtained a sample of 414 as research observations. Data analysis method used is panel data multiple regression analysis with Eviews version 10. The results of this study indicate that the population, and debt to income ratio negatively affect financial sustainability, financial independence has a positive effect on financial sustainability. Meanwhile gross regional domestic product and the human development index have no effect on financial sustainability in local governments.*

**Keywords:** *Financial sustainability, Human development index, Financial independence, Local government, Debt to revenue ratio*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi financial sustainability di sektor pemerintah. Faktor-faktor tersebut dipilih dari segi demografi, ekonomi, sosial, dan keuangan pada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini penting untuk menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia dalam membuat kebijakan yang tepat sehingga dapat mendorong keberlanjutan keuangan tanpa membebani masyarakat. Financial sustainability diukur menggunakan unsur-unsur pada Laporan Operasional yang telah disesuaikan. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2015-2018. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 414 pemerintah daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan bantuan program Eviews versi 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, dan rasio hutang pada pendapatan berpengaruh negatif terhadap financial sustainability, kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap financial sustainability. Sementara itu produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap financial sustainability di pemerintah daerah.

**Katakunci:** Financial sustainability, indeks pembangunan manusia, kemandirian keuangan, pemerintah daerah, rasio hutang pada pendapatan

*Cronicle of Article: Received (April 2020); Revised (May 2020); and Published (June 2020).  
©2020 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.*

**Profile and corresponding author:** Dinar Tri Wardhan & Payamta are from lecture of Accounting Department in Economic Faculty, Universitas Sebelas Maret. Corresponding Author: [dinarwardhani95@gmail.com](mailto:dinarwardhani95@gmail.com)

**How to cite this article:** Wardhani, D.T., & Payamta (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4 (1), 13-27.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah setelah diterbitkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Kewenangan untuk mengelola daerah yang sebelumnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, dilimpahkan oleh bupati atau walikota. Setiap kabupaten atau kota di Indonesia mengelola anggaran yang cukup besar, baik transfer dari pemerintah pusat atau pendapatan yang dihasilkan oleh daerah sendiri. Transfer dari pemerintah pusat meliputi transfer dana perimbangan, dana otonomi khusus untuk daerah tertentu, dan dana penyesuaian. Selain itu pemerintah daerah juga menerima dana yang dihasilkan dari pendapatan asli daerah meliputi pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan lain yang sah dan pendapatan luar biasa.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan, beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah juga bertambah. Beban yang ditanggung daerah tersebut sepenuhnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum atau bantuan sosial kepada masyarakat. Apabila beban lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah, pemerintah daerah mengalami defisit operasional. Pelayanan pada masyarakat kabupaten atau kota tidak hanya mengandalkan dari pendapatan saja, melainkan juga berasal dari pinjaman. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman, namun banyaknya beban dan pinjaman yang ditanggung pemerintah daerah dapat menyebabkan kondisi keuangan daerah memburuk dan tidak dapat melayani masyarakat secara maksimal.

Kabupaten atau kota mengalami kondisi keuangan yang baik apabila pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya

dan mencari pendanaan secara mandiri, hal ini dikarenakan pemerintah daerah telah diberikan hak untuk melakukan eksploitasi potensi sumber pendanaan sehingga pemerintah daerah menjadi daerah yang mandiri dan keberlanjutan (Maizunati et al., 2017).

Pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangan menjadi lebih baik melalui peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di masing-masing daerah (Andrews, 2015). Kondisi keuangan yang baik adalah kondisi keuangan yang berkelanjutan atau stabil, tidak menambah beban kepada masyarakat di periode selanjutnya (*intergenerational equity*). Ekuitas antar generasi (*intergenerational equity*) dianggap sebagai faktor penting dalam melakukan evaluasi keberlanjutan keuangan pemerintah untuk kelayakan keuangan di masa depan dalam rangka menyediakan pelayanan kepada publik (Rodríguez Bolívar et al., 2014).

Pada kenyatannya, masih banyak daerah yang bergantung dengan dana transfer dari pemerintah, namun transfer dari pemerintah tersebut tidak diikuti dengan upaya daerah dalam memperbaiki pengelolaannya (Nugraha, 2019). Padahal tujuan diberlakukannya otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan pembangunan baik atau non-fisik. Anggaran daerah untuk pengeluaran operasional lebih dominan dibandingkan pengeluaran untuk pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan, padahal anggaran dari pemerintah pusat semakin meningkat namun hal tersebut tidak diikuti dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi penting ketika kondisi suatu daerah yang selalu dinamis.

Pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien dapat menyebabkan kondisi keuangan daerah yang tidak berkelanjutan

sehingga pemerintah daerah tidak dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Irvine & Ryan (2019) menyatakan bahwa organisasi yang lebih besar, dengan potensi yang lebih besar dalam efisiensi biaya, lebih mungkin untuk mencapai keberlanjutan finansial (*financial sustainability*) sehingga mampu menghadapi ketidakpastian pendanaan dari pemerintah. Bisogno et al. (2019) menyatakan bahwa mengawasi dan melihat kondisi keuangan daerah sangat penting untuk membuat pemerintah daerah yang berkelanjutan, mulai dari sumber pembiayaan dan pendanaan.

*Financial sustainability* pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau non-ekonomi. Wallstedt et al. (2014) mengidentifikasi kesulitan keuangan daerah yang akan menghambat *financial sustainability* dapat disebabkan oleh faktor internal, eksternal, ekonomi, atau bahkan politik. Oleh karena itu, perlu diketahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan terutama keberlanjutan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai *financial sustainability* dengan berbagai metode penelitian. Slembeck et al. (2014) melakukan studi kualitatif mengenai beberapa hal yang dapat menciptakan keadaan *financial sustainability* dari sudut pandang politik dan ekonomi, yaitu peraturan terkait dengan transparansi, hukum dan independensi. Beberapa peneliti lain menggunakan berbagai macam faktor untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *financial sustainability*, seperti ukuran daerah, sosio-ekonomi, politik dan struktur keuangan (Brusca et al., 2015). Tidak jauh berbeda dari penelitian dari Brusca, terdapat penelitian mengenai faktor pendukung dan faktor resiko *financial sustainability*, faktor tersebut meliputi

faktor ekonomi, demografi, sosial dan politik (Rodríguez Bolívar et al., 2016). Selain itu, peneliti lain menguji pengaruh dimensi pendapatan, hutang dan pelayanan pada *financial sustainability* pemerintah daerah (Navarro-Galera et al., 2016).

Penelitian *financial sustainability* banyak dilakukan pada penelitian di sektor bisnis atau perbankan, sementara di sektor publik masih sangat sedikit. Hal tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *financial sustainability* di pemerintah daerah Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia. Tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa mempunyai dampak yang besar terhadap keuangan karena menjadi sentral perekonomian di Indonesia. Selain itu, banyaknya penduduk di pulau Jawa juga dapat memicu adanya berbagai permasalahan di bidang sosial dan ekonomi yang menjadi beban bagi setiap daerah, sesuai dengan pendapat dari Rodríguez Bolívar et al. (2016) efek demografis pada keuangan daerah tampak sangat jelas pada kota dengan populasi penduduk yang relatif besar. Dengan demikian, hal tersebut menjadi relevan dengan konsep *financial sustainability*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat dimensi dan lima faktor yang kemungkinan mempengaruhi *financial sustainability*. Berikut dimensi dan faktor yang diduga mempengaruhi *financial sustainability* di Indonesia.

**Tabel 1. Dimensi dan Variabel yang diuji**

Dimensi	Variabel
Demografi	Jumlah penduduk
Sosial	Indeks Pembangunan Manusia
Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto
Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan
	Rasio Hutang terhadap Pendapatan

Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015-2018 sebagai sumber data.

Sumber data dimulai dari tahun anggaran 2015 karena pada tahun tersebut setiap LKPD wajib disusun menggunakan akuntansi berbasis akrual baik untuk pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem pelaporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi *financial sustainability* dan kesejahteraan generasi mendatang (*International Federal Accountants*, 2014).

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Neo-Institusionalisme**

Teori *institusionalisme* baru atau dikenal dengan *neo-institusionalisme* merupakan pengembangan dari teori *institusionalisme* yang memiliki pandangan bahwa sebuah institusi merupakan pusat dari fenomena sosial dan politik. Teori *neo-institusionalisme* mendefinisikan institusi pada aspek formal dan non-formal, teori ini mengarah pada faktor yang mendorong dan menghambat perubahan pada kelembagaan (Putra & Sanusi, 2019). Menurut Hadler (2015) teori *institusionalisme* yang lama menjelaskan lembaga formal seperti sistem hukum, agama, ekonomi dan masyarakat, namun teori *neo-institusionalisme* menjelaskan cakupan yang luas tidak hanya pada lembaga formal saja tetapi menekankan bahwa sebuah institusi atau lembaga berperan sebagai sebuah objek.

Lembaga sebagai sebuah objek berarti lembaga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik di dalam organisasi atau di luar organisasi tersebut. *Neo-institusionalisme* lebih berfokus pada bagaimana lingkungan eksternal secara sosial membangun organisasi, memberikan sebuah model untuk struktur dan kebijakan baru sehingga dapat meningkatkan legitimasi organisasi yang lebih luas, hal tersebut ditandai oleh penekanan difusi dan isomorfisme (Powell & Bromley, 2015). Isomorfisme merupakan sebuah konsep yang

menyatakan bahwa proses homogenisasi pada lembaga disebabkan oleh adanya tekanan (*coercive isomorphism*) dari luar organisasi (DiMaggio & Powell, 1983). Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang baik kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah akan berusaha memberikan hasil yang maksimal dalam pengelolaan keuangan atau bahkan cenderung menyerupai daerah lain dalam mengelola keuangannya, sehingga pemerintah daerah diharuskan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien (*isomorfisme*). Tidak hanya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai tugas yaitu membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Menurut Riahi & Khoufi (2019), teori *neo-institusionalisme* menyimpulkan bahwa lingkungan, sebagai konstruksi sosial akan mengarahkan perilaku organisasi dan anggotanya. Jumlah penduduk di suatu daerah akan berdampak pada praktik yang dilakukan pemerintah daerah. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, permasalahan sosial dan ekonomi juga semakin meningkat seperti meningkatnya tingkat kemiskinan. Pada kondisi tersebut, pemerintah daerah mempunyai tekanan untuk mengeluarkan biaya dalam rangka menyediakan kebutuhan penduduk di daerahnya, sehingga akan berpengaruh terhadap *financial sustainability*. Ukuran populasi penduduk mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi *financial sustainability* melalui penerimaan atau penolakan atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah (Subires et al., 2019).

Penelitian ini juga menggunakan indeks pembangunan manusia yang menjadi indikator variabel sosial dan PDRB sebagai variabel ekonomi. Faktor sosial-ekonomi akan mempengaruhi pencapaian keuangan daerah yang nantinya akan mempengaruhi keberlanjutan keuangan di

daerah tersebut (Rodríguez Bolívar et al.,2019). IPM dapat menjadi indikator masyarakat untuk melihat seberapa baik kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengelola keuangannya dalam rangka meningkatkan fasilitas yang menunjang pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat. Dari dimensi ekonomi, variabel makroekonomi seperti PDRB mampu menjadi indikator bagi masyarakat dalam menilai bagaimana kualitas kebijakan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. PDRB yang tinggi maka pemerintah daerah mampu menyediakan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dua indikator tersebut mempengaruhi perubahan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Rodríguez Bolívar et al. (2019) menyatakan bahwa teori *neo institutionalisme* juga berkaitan dengan kebijakan yang sah dan diterima secara sosial oleh masyarakat. Kebijakan tersebut termasuk dalam skema pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap daerah mempunyai wewenang untuk menerima pendapatan yang dihasilkan secara mandiri diantaranya adanya pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lainnya yang sah. Kebijakan diterima oleh masyarakat. Daerah yang mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi merefleksikan daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk membiayai kegiatan pemerintahan tanpa harus menggantungkan dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi juga mempunyai kemampuan untuk mencapai *financial sustainability*.

Pemerintah daerah mempunyai pinjaman lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mampu membayar hutang dan memberikan

pelayanan yang maksimal untuk masyarakat, hal tersebut karena sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah terbatas, sehingga pemerintah daerah akan mengambil kebijakan yang nantinya akan membebani masyarakat seperti kenaikan tarif retribusi atau pajak daerah. Dengan demikian rasio hutang terhadap pendapatan yang tinggi menjadi faktor yang akan menghambat pemerintah daerah untuk mencapai *financial sustainability*.

### ***Financial Sustainability***

Pengelolaan keuangan menjadi masalah yang penting di setiap daerah karena berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Subires & Bolívar (2017) pengelolaan keuangan sebagai akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat mengalami perubahan yang pada awalnya berpedoman pada indikator kondisi keuangan dan kesulitan keuangan, saat ini beralih menuju keberlanjutan keuangan. Kondisi keuangan (*financial condition*) dan kesulitan keuangan (*fiscal distress*) mempunyai dasar pada informasi keuangan historis sedangkan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) memberikan informasi yang bermanfaat tidak hanya untuk mengantisipasi dan menyelesaikan risiko, namun bertujuan menjaga pelayanan kepada generasi mendatang dengan kualitas dan jumlah layanan publik yang sama.

Menurut Slembeck et al. (2014) *financial sustainability* adalah sebuah tujuan jangka panjang yang mengharuskan pemerintah untuk mencapai surplus yang besar dalam rangka menutup biaya pembayaran utang. Bröthaler et al. (2015) menyatakan *financial sustainability* merupakan kemampuan kota menerbitkan obligasi atau pinjaman untuk membiayai investasi. *Financial sustainability* juga mengacu pada kondisi keuangan dan kesehatan fiskal yang mewakili kemampuan untuk

mematuhi kewajiban saat ini dan masa depan melalui arus masuk yang tepat dengan pajak, transfer dan layanan untuk mempertahankan tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat (Brusca et al., 2015). *Financial sustainability* dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan saat ini tanpa mengurangi kemampuannya untuk melakukannya di masa depan, dan itu adalah konsep yang lebih luas meliputi tiga dimensi yang saling berkaitan, dimensi tersebut meliputi layanan, pendapatan, dan utang (Rodríguez Bolívar et al., 2018).

Konsep keberlanjutan keuangan pada penelitian ini mengacu pada penelitian dari Rodríguez Bolívar et al. (2016) yang menggunakan laporan pendapatan yang telah disesuaikan. Penyesuaian pendapatan tersebut dengan menghilangkan unsur pendapatan luar biasa, karena unsur tersebut termasuk kegiatan luar biasa yang diperkirakan tidak akan terulang lagi di masa mendatang dan tidak mempunyai ruang lingkup di masa depan. Menurut Rodríguez Bolívar pendekatan berbasis akrual mencakup konsumsi investasi modal, perkiraan biaya dan pengeluaran di masa depan yang terjadi dianggap efektif mewakili kapasitas daerah untuk mempertahankan keberlanjutan keuangan di masa depan. Berkaitan dengan hal itu, surplus yang ada pada laporan pendapatan operasional dapat menjadi indikator dari keberlanjutan keuangan di sektor pemerintah.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap *Financial Sustainability***

Penduduk adalah individu yang menempati suatu wilayah tertentu berdasarkan ketentuan hukum. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk kabupaten atau kota, maka semakin bertambah juga tuntutan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Beban dan

pengeluaran yang ditanggung oleh pemerintah daerah akan meningkat.

Penelitian dari Ritonga et al. (2019) menyatakan bahwa populasi penduduk berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan daerah. Arunachalam et al. (2017) melakukan sistem penilaian untuk mengukur *financial sustainability* kota dan menyatakan bahwa faktor demografis mempunyai nilai skor yang rendah dalam penilaian tersebut. Ukuran populasi berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability* karena pertumbuhan penduduk tidak selalu mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain pertumbuhan penduduk akan meningkatkan permintaan jumlah layanan, barang dan jasa (Subires et al., 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini merumuskan hipotesis berkaitan dengan pengaruh jumlah penduduk terhadap *financial sustainability* sebagai berikut.

*H1: Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap financial sustainability kabupaten/kota di Indonesia*

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap *Financial Sustainability***

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di dunia (Sarkoro dan Zulfikar, 2016). Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi yaitu (1) umur panjang dan kesehatan, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup yang layak. Daerah yang mempunyai indeks tingkat pendidikan yang tinggi, kehidupan yang layak dan tingkat kesehatan yang memadai mengindikasikan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang baik.

Menurut *The International Public Sector Accounting Standards Board* (2013) pemerintah yang dapat mempertahankan tingkat dan kualitas pemberian layanan tergolong dalam daerah dengan

keuangan yang berkelanjutan. Rodríguez Bolívar et al. (2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi akan memberi manfaat bagi keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, karena masyarakat yang berpendidikan tinggi menuntut lebih banyak informasi mengenai keuangan daerah sehingga mendorong pemerintah untuk lebih perhatian mengenai hal tersebut. Saputra et al. (2018) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia yang tinggi mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, indeks pembangunan manusia mampu meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini merumuskan hipotesis berkaitan dengan hubungan indeks pembangunan manusia dan *financial sustainability* sebagai berikut.

*H2: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap financial sustainability kabupaten/kota di Indonesia.*

### **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap *Financial Sustainability***

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah barang dan jasa yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik yang dibantu dengan faktor produksi di suatu wilayah atau residen. PDRB berkaitan dengan penerimaan pajak di daerah tersebut. Menurut penelitian dari Aryanti & Indarti (2012) PDRB berpengaruh secara positif terhadap penerimaan daerah terutama pajak.

Ketika penerimaan daerah meningkat maka terdapat indikasi daerah tersebut mempunyai kondisi keuangan yang berkelanjutan, karena pendapatan merupakan salah satu dimensi dalam keberlanjutan keuangan. Penelitian dari Batu et al. (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan GDP per kapita berpengaruh negatif terhadap ketidakstabilan keuangan. Berbeda dengan pendapat Batu,

penelitian dari Rodríguez Bolívar et al. (2016) menyatakan GDP pada pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability*. Ketidakpastian hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti ingin menguji kembali variabel PDRB, sehingga penelitian ini merumuskan hipotesis berkaitan dengan hubungan PDRB dan *financial sustainability* sebagai berikut.

*H3: PDRB berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan kabupaten/kota di Indonesia.*

### **Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Sustainability***

Kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Kemandirian keuangan merupakan kemampuan daerah untuk melaksanakan hak keuangan secara efisien dan efektif ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (Ritonga, 2014).

Daerah yang memberikan pelayanan yang dananya bersumber dari penerimaan asli daerah maka keberlanjutan keuangan daerah tersebut akan lebih baik, karena tidak sepenuhnya bergantung pada utang atau penerimaan dari pemerintah pusat. Brusca et al. (2015) menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap surplus operasi. Ritonga et al. (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan dapat menjadi indikator untuk menilai kondisi keuangan suatu daerah. Navarro-Galera et al. (2016) menyatakan bahwa pendapatan internal suatu daerah dapat berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini merumuskan hipotesis berkaitan dengan kemandirian keuangan dan *financial sustainability* sebagai berikut.

*H5: Kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap financial sustainability kabupaten/kota di Indonesia.*

### **Pengaruh Rasio Hutang pada Pendapatan terhadap *Financial Sustainability***

Rasio hutang pada pendapatan (*debt to total revenue*) adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman. Peningkatan pinjaman daerah menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah jika tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk membayar pinjaman tersebut. Ketika pemerintah tidak mampu membayar pinjaman, beban pemerintah akan semakin bertambah dan akan berdampak pada kualitas pelayanan.

Menurut Faulk & Killian (2017), beban hutang akan mengancam *intergenerational equity*, hutang disusun sedemikian rupa sehingga setiap generasi menanggung hutang sepadan dengan peningkatan kualitas pelayanan, seperti rumah sakit dan perpustakaan yang dibiayai oleh hutang, hutang tersebut akan muncul di setiap generasi sehingga kemampuan daerah untuk menanggapi kebutuhan yang darurat akan dibatasi dengan kewajiban membayar hutang. Pembiayaan yang berasal dari hutang membuat pemerintah daerah lebih beresiko mengalami tekanan keuangan (Trussel & Patrick, 2009).

Ketika mengalami tekanan keuangan pemerintah daerah tidak mempunyai dana yang cukup untuk memberikan pelayanan berkualitas dan kemungkinan akan meningkatkan tarif pajak yang kemudian menjadi beban bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini merumuskan hipotesis berkaitan dengan hubungan rasio hutang terhadap pendapatan dan *financial sustainability* sebagai berikut.

*H6: Rasio Hutang terhadap Total Pendapatan (DTR) berpengaruh negatif terhadap financial sustainability kabupaten/kota di Indonesia.*

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdasar pada pengolahan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015-2018 dan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Sampel pada penelitian ini berjumlah 414. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu kabupaten atau kota di Pulau Jawa dengan kriteria ketersediaan data. Variabel pada penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen dan lima variabel independen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Financial Sustainability* (FS). Definisi dari *Financial Sustainability* adalah Kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan saat ini tanpa mengurangi kemampuannya untuk melakukannya di masa depan, dihitung berdasarkan pendapatan yang telah disesuaikan, yaitu selisih antara pendapatan operasional dengan beban operasional yang telah dikurangkan dengan pos luar biasa (Rodríguez Bolívar et al., 2018). Sumber data variabel dependen dari Laporan Operasional.

Variabel independen yang pertama adalah jumlah penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia (BPS, 2020). Data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten atau kota di Pulau Jawa tahun 2016-2017. Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Definisi IPM menurut Sarkoro & Zulfikar (2016) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran kabupaten/kota di tahun 2016-2017. Ketiga, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB merupakan Barang dan jasa yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik yang



dibantu dengan faktor produksi di suatu wilayah atau residen (BPS, 2020). Keempat, kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan adalah Rasio perbandingan antara pendapatan asli daerah dan total pendapatan operasional (Rodríguez Bolívar et al., 2014). Variabel independen yang terakhir adalah Rasio Hutang terhadap total pendapatan (DTR). *Debt to Revenue* (DTR) adalah Perbandingan antara jumlah total hutang terhadap jumlah pendapatan (Atmaja, 2012). Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel. Adapun model regresi yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan

$$\alpha + \beta_1 JP + \beta_2 IPM + \beta_3 PDRB + \beta_4 KEMANDIRIAN + \beta_5 DTR + \varepsilon$$

sebagai berikut.

FS=

Keterangan:

FS	=	<i>Financial Sustainability</i>
JP	=	Jumlah Penduduk
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
KEMANDIRIAN	=	Kemandirian Keuangan
DTR	=	<i>Debt to Revenue</i>
$\varepsilon$	=	error

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan tahap awal dalam melakukan analisis data, analisis ini bertujuan mengetahui karakteristik data seperti rata-rata, median, standar deviasi, nilai maksimal atau minimal suatu data, berikut ini tabel analisis deskriptif dari masing-masing variabel menggunakan Eviews 10.

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

	FS	JP	IPM	PDRB	KEMANDIRIAN	DTR
Mean	296.896,1	1.234.835	70,563	5,442	0,197	0,017
Median	251.913,5	1.050.350	69,795	5,445	0,165	0,012
Maximum	1.425.086	5.840.907	86,11	10,84	0,625	0,104
Minimum	1054,3	121.112	58,18	0,08	0,067	0,001
Std. Dev.	188.711,5	860.020,1	5,192	0,891	0,101	0,017

Sumber: Hasil olahan data Eviews 10 (2020)

Pada tabel 1 diketahui bahwa *financial sustainability* (FS) kabupaten/kota di Pulau Jawa mempunyai nilai rata-rata 296.896,1. Nilai maksimum sebesar 1.425.086, nilai minimum sebesar 1.054,3 dengan standar deviasi sebesar 188.711,5. Variabel jumlah penduduk (JP) mempunyai nilai rata-rata sebesar 1.234.835, nilai maksimum sebesar 5.840.907, nilai minimum sebesar 121.112 dengan standar deviasi sebesar 860.020,1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai nilai rata-rata sebesar 70,563. Nilai maksimum sebesar 86,11, nilai minimum sebesar 58,18, dengan standar deviasi sebesar 5,192. Variabel produk domestik bruto regional (PDRB) mempunyai nilai rata-rata sebesar 5,442,

nilai maksimum sebesar 10,84, nilai minimum 0,08 dengan standar deviasi sebesar 0,891. Variabel kemandirian keuangan (KEMANDIRIAN) mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,197. Nilai maksimum sebesar 0,625, nilai minimum sebesar 0,067 dengan standar deviasi sebesar 0,101. Variabel rasio hutang terhadap total pendapatan (DTR) mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,017. Nilai maksimum sebesar 0,104, nilai minimum sebesar 0,001 dengan standar deviasi sebesar 0,017.

### Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui

pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel dependen). Data penelitian ini antara tahun 2015 dan 2018 sehingga analisis regresi berganda dalam

penelitian ini adalah analisis regresi berganda data panel. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross sectional*.

**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-81.438,10	-0,279	0,781
POP	-0,094215	-5,356	0,000*
IPM	5.619,405	1,213	0,225
PDRB	4.366,742	0,394	0,694
KEMANDIRIAN	455.384,1	3,819	0,000*
DTR	-789.638,4	-2,041	0,041*

**Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Weighted Statistics	
R-squared	0,156
Adjusted R-squared	0,146
F-statistic	15,127
Prob(F-statistic)	0.000

Sumber: Hasil olahan data Eviews 10 (2020)

\* = tingkat signifikansi 0,05%

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel JP mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini berarti variabel JP mempengaruhi *financial sustainability* pada pemerintah daerah di Pulau Jawa, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel IPM mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,225 sehingga memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Hal tersebut berarti variabel IPM tidak mempengaruhi *financial sustainability* pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Variabel PDRB mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,694, memiliki nilai di atas 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak mempengaruhi *financial sustainability*. Variabel KEMANDIRIAN mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut berarti variabel KEMANDIRIAN mempunyai pengaruh terhadap *financial sustainability* pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Terakhir, variabel DTR mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,041, nilai tersebut di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel DTR mempengaruhi *financial*

*sustainability* pada pemerintah daerah di Pulau Jawa.

### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian. Pada tabel 2, *Adjusted R-square* menunjukkan nilai 0,146 atau sama dengan 14,6 %. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa *financial sustainability* dipengaruhi oleh jumlah penduduk, IPM, PDRB, kemandirian keuangan dan rasio hutang terhadap pendapatan (DTR) sebesar 14,6%, sedangkan sisanya 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### PEMBAHASAN

#### Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability* di pemerintah

daerah. Hal tersebut sesuai penelitian dari Ritonga et al. (2019) yang menyatakan bahwa seiring bertambahnya jumlah penduduk, banyak fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melayani masyarakat, selain itu banyak masalah sosial lain yang bertambah juga, sehingga beban pemerintah daerah akan semakin meningkat. Rodríguez Bolívar et al. (2016) menyatakan bahwa ukuran populasi suatu daerah mempunyai hubungan negatif terhadap *financial sustainability*.

Teori *neo-institutionalism* menjelaskan bagaimana lingkungan eksternal dapat mempengaruhi sebuah lembaga atau organisasi. Banyaknya jumlah penduduk akan memberi tekanan pada pemerintah daerah untuk lebih menyediakan fasilitas publik yang berkualitas. Tekanan tersebut akan semakin bertambah apabila daerah tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dengan kondisi tersebut kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat dimungkinkan tidak akan berkelanjutan.

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability* di pemerintah daerah. IPM menjadi tolak ukur atas kualitas hidup masyarakat di suatu daerah yang berkaitan dengan angka harapan hidup, pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pada penelitian ini mengambil sampel kabupaten atau kota di Pulau Jawa, hal ini mengisyaratkan tinggi atau rendahnya IPM pada kabupaten atau kota di Jawa tidak mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Riphath et al. (2016) yang menyatakan

bahwa IPM tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Tidak berpengaruhnya secara signifikan IPM terhadap *financial sustainability* pada pemerintah daerah kemungkinan karena masih adanya kesenjangan IPM di berbagai wilayah di Pulau Jawa, sesuai dengan pendapat dari Fauzia (2019) yang menyatakan bahwa disparitas atau kesenjangan IPM antar kabupaten atau kota masih sangat tinggi.

### **Pengaruh PDRB terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability* pada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian dari Rodríguez Bolívar et al. (2016) yang menyatakan bahwa variabel produk domestik bruto tidak mempunyai pengaruh terhadap *financial sustainability*. Tidak adanya pengaruh variabel PDRB terhadap *financial sustainability* kemungkinan terjadi karena terbatasnya periode pengamatan penelitian atau metode analisis data yang kurang sesuai.

### **Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap *financial sustainability* pada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Brusca et al. (2015) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh pada surplus operasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang tinggi termasuk daerah yang mandiri. Pemerintah mempunyai kemampuan untuk mendapatkan dana melalui sumber daya yang dimiliki, tidak bergantung kepada pinjaman dan bantuan dari pihak lain

untuk mendanai fasilitas atau memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, pemerintah daerah tidak akan terbebani karena adanya hutang atau pinjaman kepada pihak lain, sehingga keuangan daerah dapat berkelanjutan.

### **Pengaruh Rasio Hutang terhadap Pendapatan terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian hipotesis terakhir menunjukkan bahwa rasio hutang terhadap pendapatan berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability* di pemerintah daerah. Daerah yang hutangnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan akan kesulitan untuk membayar hutang, sehingga kemungkinan hutang tersebut akan selalu ada di periode selanjutnya, atau bahkan akan dibebankan kepada generasi berikutnya. Pada kondisi tersebut pemerintah daerah tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Faulk & Killian (2017) yang menyatakan bahwa ketika beban hutang pemerintah daerah semakin tinggi, maka pemerintah daerah tidak mampu untuk mendanai kebutuhan masyarakat karena dibatasi oleh kewajibannya melunasi hutang.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *financial sustainability* di sektor pemerintah. Jumlah penduduk secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability*, semakin banyak jumlah penduduk di suatu daerah beban pemerintah daerah semakin meningkat sehingga tidak mampu memberikan pelayanan yang berkualitas secara berkelanjutan. Selain itu rasio hutang yang tinggi juga berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability*, pemerintah daerah yang mempunyai rasio hutang terhadap pendapatan yang tinggi akan kesulitan dalam melunasi hutang,

dengan demikian pemerintah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena dibatasi dengan hutang.

Kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap *financial sustainability* Daerah yang mempunyai kemampuan menghasilkan pendapatan sendiri kemungkinan kecil bergantung pada pihak lain dalam memperoleh dana, sehingga pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pelayanan tanpa harus menanggung hutang atau sepenuhnya bergantung dengan pemerintah pusat.

Variabel kemandirian keuangan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi *financial sustainability* pada pemerintah daerah di pulau Jawa karena dengan tingginya tingkat kemandirian keuangan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut mampu mengelola sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan baik, dengan demikian pemerintah daerah mampu untuk memberikan pelayanan yang berkualitas secara berkelanjutan tanpa harus meninggalkan beban atau hutang untuk generasi mendatang. Adapun variabel Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability* di sektor pemerintah.

Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis sebagai bukti empiris dan tambahan pengetahuan mengenai *financial sustainability* pada sektor pemerintah yang nantinya dapat dikembangkan lebih luas oleh penelitan selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah daerah baik kabupaten atau kota untuk mengambil kebijakan dalam mengelola keuangan daerahnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menghambat atau mendorong *financial sustainability* di masing-masing daerah.

### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Keterbatasan penelitian ini adalah rentang waktu pengamatan terbatas yaitu hanya

pada tahun 2015-2018. Selain itu penelitian ini mempunyai nilai *adjusted r-square* yang tergolong kecil, sehingga masih banyak kemungkinan model penelitian atau variabel lain yang dapat mempengaruhi *financial sustainability* di sektor pemerintah terutama variabel yang berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menambahkan variabel lain terutama variabel yang berkaitan dengan keuangan atau akuntansi dari pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap *financial sustainability* di sektor pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R. (2015). Vertical consolidation and financial sustainability: evidence from English local government. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 33(6), 1518–1545. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614179>
- Arunachalam, M., Chen, C., Davey, H., & Zealand, N. (2017). A model for measuring financial sustainability of local authorities: model development and application. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 12(1), 39–76.
- Aryanti, E., & Indarti, I. (2012). Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 33-47.
- BPS. (2020). *Badan Pusat Statistik: Sosial dan Kependudukan*. Retrieved 02 14, 2020, from <https://www.bps.go.id>
- Batuo, M., Mlambo, K., & Asongu, S. (2018). Linkages between financial development, financial instability, financial liberalisation and economic growth in Africa. *Research in International Business and Finance*, 45(October), 168–179. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.148>
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Citro, F. (2019). Budgetary solvency of Italian local governments: an assessment. *International Journal of Public Sector Management*, 32(2), 122–141. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2017-0328>
- Bröthaler, J., Getzner, M., & Haber, G. (2015). Sustainability of local government debt: a case study of Austrian municipalities. *Empirica*, 42(3), 521–546. <https://doi.org/10.1007/s10663-014-9261-3>
- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2015). Drivers for the financial condition of local government: A comparative study between Italy and Spain. *Lex Localis*, 13(2), 161–184. [https://doi.org/10.4335/13.2.161-184\(2015\)](https://doi.org/10.4335/13.2.161-184(2015))
- DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Faulk, D., & Killian, L. (2017). Special Districts and Local Government Debt: An Analysis of “Old Northwest Territory” States. *Public Budgeting and Finance*, 37(1), 112–134. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12122>
- Fauzia, M. (2019, April 15). *Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Antar-Daerah Tinggi*. Diakses pada Februari 25, 2020, from Kompas.com: <https://money.kompas.com/>
- Hadler, M. (2015). Institutionalism and Neo-institutionalism: History of the Concepts. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Second Edi, Vol. 12). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.03187-1>
- International Federal Accountants. (2014, April). *The Importance of*

- Accrual-based Financial Reporting In the Public Sector*. Diakses pada Mei 18, 2020, dari <https://www.ifac.org/>
- The International Public Sector Accounting Standards Board. (2013, 24 Juli). *IPSASB Publishes First Recommended Practice Guideline on the Long-Term Sustainability of Public Finances*. Diakses pada November 4, 2019, dari <https://www.ipsasb.org>
- Irvine, H., & Ryan, C. (2019). The financial health of Australian universities: policy implications in a changing environment. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(5), 1500-1531. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2018-3391>
- Irwan Taufiq Ritonga. (2014). Developing a measure of local government's financial condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142-164. <https://doi.org/10.3389/fphys.2017.01021>
- Maizunati, N. A., Daerah, P., Pusat, P., Daerah, P., & Magelang, K. (2017). Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2, 140-162.
- Navarro-Galera, A., Rodríguez-Bolívar, M. P., Alcaide-Muñoz, L., & López-Subires, M. D. (2016). Measuring the financial sustainability and its influential factors in local governments. *Applied Economics*, 48(41), 3961-3975. <https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1148260>
- Nugraha, Y. N. (2019, 20 Januari). *Ketertanggung Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Diakses pada 28 November 2019, dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/>
- Powell, W. W., & Bromley, P. (2015). New Institutionalism in the Analysis of Complex Organizations. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition, November 2017*, 764-769. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.32181-X>
- Putra, F., & Sanusi, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme. Malang: LP3ES.
- Riahi, O., & Khoufi, W. (2019). Understanding IFRS adoption: Consideration of the institutional dimension through a behavioral context. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(4), 543-570. <https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2017-0034>
- Riphat, S., Setiawan, H., & Damayanty, S. A. (2016). Causality Analysis Between Financial Performance And Human Development Index : A Case Study Of Provinces In Eastern Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3), 231-240.
- Ritonga, I., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia : an Exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2), 37-50.
- Ritonga, I. T. (2014). Developing a measure of local government's financial condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142-164. <https://doi.org/10.22146/jieb.6206>
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 1-25. <https://doi.org/10.18196/jai.2002114>
- Rodríguez Bolívar, M. P., López Subires, M. D., Alcaide Muñoz, L., & Navarro Galera, A. (2019). The financial sustainability of local authorities in England and Spain: a comparative empirical study. *International Review*

- of *Administrative Sciences*.  
<https://doi.org/10.1177/0020852319834721>
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., & López Subirés, M. D. (2014). Factors influencing local government financial sustainability: An empirical study. *Lex Localis*, 12(1), 31–54. [https://doi.org/10.4335/12.1.31-54\(2014\)](https://doi.org/10.4335/12.1.31-54(2014))
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., & López Subirés, M. D. (2016). Risk Factors and Drivers of Financial Sustainability in Local Government: An Empirical Study. *Local Government Studies*, 42(1), 29–51. <https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1061506>
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., López Subirés, M. D., & Alcaide Muñoz, L. (2018). Analysing the accounting measurement of financial sustainability in local governments through political factors. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(8), 2135–2164. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2016-2754>
- Saputra, D. A., Ardila, L. N., Siddi, P., & Sutopo, B. (2018). Financial characteristics, human development index, and performance: a study of local governments in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 94–104. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art2>
- Sarkoro, H., & Zulfikar. (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 54–63.
- Slembeck, T., Jans, A., & Leu, T. (2014). A politico-economic perspective on financial sustainability. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 26(1), 140–164.
- Subires, M. D. L., Muñoz, L. A., Galera, A. N., & Bolívar, M. P. R. (2019). The influence of socio-demographic factors on financial sustainability of public services: A comparative analysis in regional governments and local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 11(21). <https://doi.org/10.3390/su11216008>
- Subires, M. D., & Bolívar, M. P. (2017). Financial Sustainability in Governments. A New Concept and Measure for Meeting New Information Needs. In M. P. Bolívar, *Financial Sustainability in Public Administration* (pp. 3–20). Granada: Palgrave Macmillan, Cham.
- Trussel, J. M., & Patrick, P. A. (2009). A predictive model of fiscal distress in local governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 21(4), 578–616. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-21-04-2009-b004>
- Wällstedt, N., Grossi, G., & Almqvist, R. (2014). Organizational solutions for financial sustainability: A comparative case study from the Swedish municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 26(1), 181–218.